

**PENGARUH HINDUTVA DALAM KEBIJAKAN PEMERINTAHAN INDIA
TERKAIT PERSOALAN IMIGRAN MUSLIM
(STUDI KASUS AMANDEMEN UU KEWARGANEGARAAN TAHUN 2019)**

SKRIPSI



Oleh:

NAHLA WAHDATAN NASRAH ASYÁRI

173233048

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2021

**PENGARUH HINDUTVA DALAM KEBIJAKAN PEMERINTAHAN INDIA
TERKAIT PERSOALAN IMIGRAN MUSLIM
(STUDI KASUS AMANDEMEN UU KEWARGANEGARAAN TAHUN 2019)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat Guna Memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

NAHLA WAHDATAN NASRAH ASYÁRI

17323048

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2021

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul:

**PENGARUH HINDUTVA DALAM KEBIJAKAN PEMERINTAHAN INDIA
TERKAIT PERSOALAN IMIGRAN MUSLIM
(STUDI KASUS AMANDEMEN UU KEWARGANEGARAAN TAHUN 2019)**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat – Syarat
Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

30 Juli 2022

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

(Hangga Fathana, S.I.P., B.Int.St., M.A)

Dewan Penguji:

1. Hadza Min Fadhly Robby S.I.P., M.Sc.
2. Hasbi Aswar S.I.P., M.A.
3. Rizki Dian Nursita, S.I.P., M.H.I.

Tanda Tangan



HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nahla Wahdatan Nasrah Asyári

No. Mahasiswa : 17323048

Program Studi : Hubungan Internasional

Judul Skripsi : Pengaruh Hindutva dalam Kebijakan Pemerintahan India
terkait Persoalan Imigran Muslim (Studi Kasus
Amandemen UU Kewarganegaraan tahun 2019)

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa:

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi saya tidak melakukan tindakan pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung Universitas Islam Indonesia. Karena itu, skripsi yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai peneliti, bukan karya jiplakan atau karya orang lain.
2. Apabila dalam ujian skripsi saya terbukti melanggar etika akademik, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.
3. Apabila di kemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 22 Desember 2020

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular postage stamp. The stamp is green and brown, with the number '10000' in large red digits. Below the number, it says 'MEPERAI TEMPEL' and 'EC101AJX834947468'.

Nahla Wahdatan Nasrah Asyári

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin

Rasa syukur tanpa henti selalu penulis ucapkan atas terselesaikannya penelitian ini yang melewati segala proses penelitian hingga menghasilkan karya sederhana ini sebagai tanda bakti dan terima kasih yang saya persembahkan untuk:

Papa dan Mama

Terimakasih untuk papa dan mama yang senantiasa mengiringi doa dan dukungan yang tak pernah putus sepanjang jalan sehingga mampu melewati semua proses ini. Terimakasih atas segala kasih sayang yang memotivasi diri ini untuk selalu berusaha dan menciptakan pribadi yang mandiri. Semoga ini menjadi awal yang baik untuk berjuang dan membentuk masa depan yang bermanfaat serta memberikan rasa nyaman untuk papa dan mama pada masa yang akan datang.

Adik dan Keluarga Besar

Terimakasih atas segala dukungan, motivasi, dan do'a yang selalu bisa berhasil dalam mengembalikan rasa semangat pada proses penyusunan penelitian ini.

Rekan-rekan HI UII Angkatan 2017

Terimakasih atas segala doa, dukungan, dan perjuangan pada masa perkuliahan.

HALAMAN MOTTO

من عرف بُعدَ سبيلِ سائرِ
ال
ر

“Barang siapa tahu jauhnya perjalanan, bersiap-siapilah ia”



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah serta sholawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam. Berkat limpahan rahmat-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang mana merupakan persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hubungan Internasional pada Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa dalam proses pengerjaan skripsi ini tidak bisa lepas dari bimbingan, dorongan, nasehat dan bantuan baik materil maupun spiritual dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, yang tanpa henti mengaliri rahmat-Nya kepada penulis.
2. Kedua orang tua, kakak, serta keluarga besar atas segala kasih sayang, do'a dan dukungan yang begitu memotivasi penulis untuk dapat terus berjuang dan melawan rasa malas untuk mempersiapkan masa depan yang baik. Segala jasa yang diberikan sungguh tak dapat di deskripsikan dengan kata betapa bersyukur saya berada pada lingkungan keluarga yang suportif dan menjadikan diri ini untuk terus berusaha mencapai apapun dengan baik. Semoga keluargaku, sebagai orang pertama yang selalu saya cintai, selalu dibawah lindungan Allah SWT.
3. Bapak Dr. H. Fuad Nashori, S.Psi., MA.g., Psikolog selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia
4. Bapak Hadza Min Fadhli Robby S.I.P., M.Sc. selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah berperan besar dalam memberikan bimbingan, ilmu, motivasi, dan arahnya sehingga penulis bisa meraih capaian ini. Sungguh syukur tidak pernah henti sayaucapkan atas segala jasa yang bapak berikan dalam penulisan penelitian ini. Terimakasih atas segala bentuk motivasi, ilmu dan saran yang bapak sampaikan sehingga membuat diri ini merasa semakin percaya diri terhadap kemampuan yang dimiliki. Setiap bimbingan selalu memberikan semangat, motivasi, dan ilmu yang kemudian menjadi

dorongan utama dalam menyelesaikan skripsi ini. Saya juga ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas waktu yang sudah diluangkan untuk memeriksa dan merevisi skripsi saya yang mungkin seharusnya digunakan untuk istirahat, dan saya juga memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah sikap dan perkataan yang pernah saya buat dari awal bimbingan hingga pada saat sidang. Semoga segala kebaikan yang telah bapak berikan akan dibalas dengan kebaikan untuk bapak dan keluarga yang berlipat ganda oleh Allah SWT. Aamiin

5. Bapak Enggar Furi Herdianto S.I.P., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA). Terimakasih atas bimbingan, dampingan serta bantuan yang telah diberikan selama studi saya di HI UII. Tidak pernah sekalipun saya merasa tersesat dikarenakan bapak senantiasa memberikan informasi yang bermanfaat bagi kami. Terimakasih banyak Bapak, semoga bapak selalu bertemu dengan orang-orang baik dan kebaikan bapak akan dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda oleh Allah SWT. Aamiin.
6. Segenap tim penguji skripsi Bapak Hasbi Aswar S.IP., M.A. dan Ibu Rizki Dian Nursita, S.IP., M.H.I. yang telah menguji, mengoreksi, mengkritik dan memberikan saran kepada penulis tentang skripsi ini, sehingga skripsi ini bisa lebih bermakna dan berguna.
7. Seluruh dosen dan civitas akademika Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia. Berkat pengorbanan, ketulusan, kebaikan, dan ilmu pengetahuan yang Bapak dan Ibu berikan, kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna. Tak lupa juga saya ucapkan kepada Mbak Mardiatul Hasanah selaku staff prodi HI UII yang selalu membantu kami dengan kesabaran, baik dalam urusan-urusan akademik dan juga membantu dalam masalah penyelesaian skripsi ini. Semoga program studi HI UII akan selalu sukses dan membanggakan dari segi kualitas pendidikan yang diberikan.
8. Sahabat satu kos semester terakhir penulis berkuliah. Terimakasih atas semua bantuan, cerita, semangat, dan terimakasih telah menjadi

salah satu saksi pengalaman suka duka penulis selama masa perkuliahan.

9. Sahabat-sahabat ngopi dan curhat selama perkuliahan, Muhammad Adli Widodo, Nuries Widya dan Rudiany Rizky Zamzamy. Terimakasih telah menjadi saksi perjalanan dan pengalaman selama perkuliahan.
10. Dan teman teman yang selalu menjawab pertanyaan tentang penulisan skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah hadir dan memberikan perubahan pada diri saya. Terimakasih telah datang dan juga memberi dukungan dengan berbagai cara, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian dengan berlipat ganda.

Atas segala bantuan yang telah diberikan, semoga mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 8 Maret 2021



Nahla Wahdatan Nasrah Asyari



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	I
HALAMAN PERNYATAAN	II
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	III
HALAMAN MOTTO.....	IV
KATA PENGANTAR.....	V
DAFTAR ISI	VII
DAFTAR TABEL	IX
DAFTAR GAMBAR.....	X
DAFTAR SINGKATAN	XI
ABSTRAK	XII
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	5
1.3 TUJUAN PENELITIAN.....	6
1.4 CAKUPAN PENELITIAN	6
1.5 TINJAUAN PUSTAKA	6
1.6 LANDASAN TEORI	9
1.7 ARGUMEN SEMENTARA.....	14
1.8 SISTEMATIKA PEMBAHASAN.....	14
1.9 METODE PENELITIAN.....	15
BAB 2 IDEOLOGI HINDUTVA DAN PENGARUH PARTAI POLITIK INDIA ERA NARENDRA MODI.....	17
2.1. HINDUTVA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONALISME KEAGAMAAN DI INDIA	17
2.2. HUBUNGAN HINDUTVA DAN BJP (BHARATIYA JANATA PARTY) DI PEMERINTAHAN NARENDRA MODI	21
BAB 3 ANALISIS KEBIJAKAN HINDUTVA TERHADAP CAA (CITIZEN AMANDEMEN ACT)	27
3.1 KONDISI POLITIK DOMESTIK INDIA.....	28
3.2 KAPABILITAS EKONOMI DAN MILITER INDIA	39
3.3 KOTEKS INTERNASIONAL (KUALITAS PENGARUH HINDUTVA TERHADAP KEBIJAKAN MIGRASI INDIA).....	42
BAB 4 PENUTUP	49
4.1 KESIMPULAN.....	49
4.2 REKOMENDASI/SARAN.....	51
DAFTAR PUSTAKA	53



DAFTAR TABEL

Table 1: Denah Kekuasaan Hindutva.....	26
Table 2: RUU Kewarganegaraan (Amandemen) 2019, Kementrian; Urusan Dalam Negri	32
Table 3: Perbandingan RUU Kewarganegaraan (Amandemen), 2016 yang disahkan di Lok Sabha, dengan RUU (Amandemen) Kewarganegaraan, 2019	33



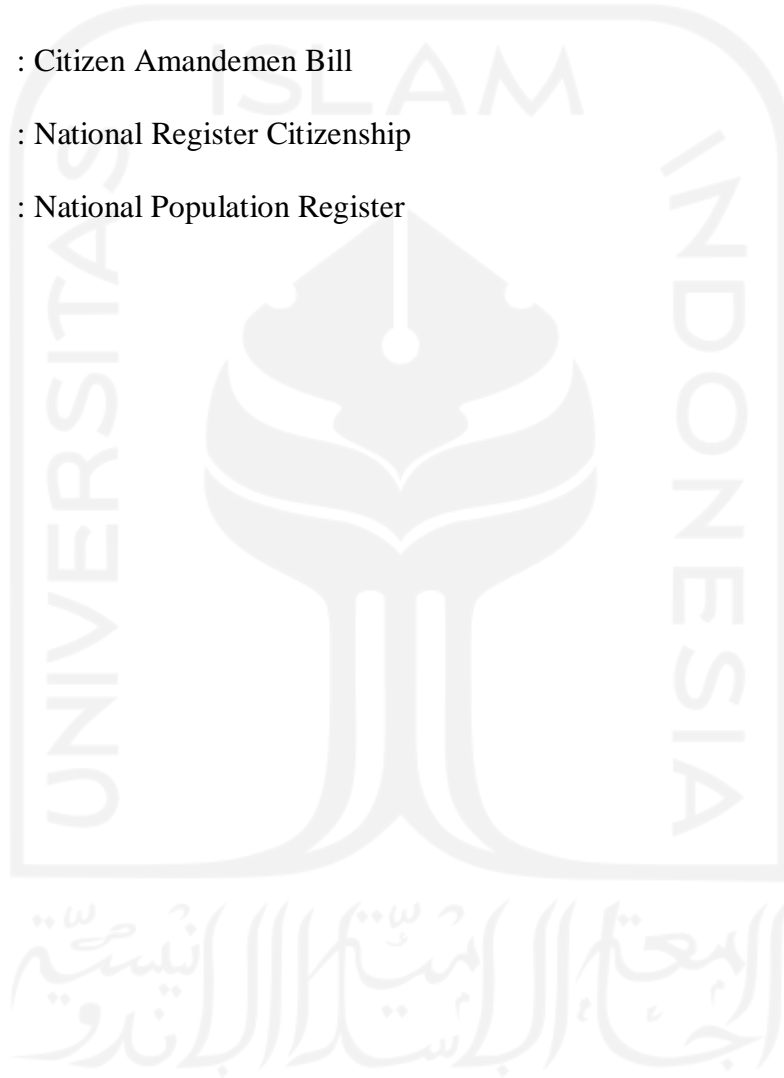
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Status CAA, NRC dan NPR.....46



DAFTAR SINGKATAN

- BJP : Bharatiya Janata Party
RSS : Rashtriya Swayamsevak Sangh
UU : Undang Undang
CAA : Citizen Amandemen Act
CAB : Citizen Amandemen Bill
NRC : National Register Citizenship
NPR : National Population Register



ABSTRAK

India merupakan salah satu negara yang memiliki beragam agama dan budaya. Dari beragam agama dan budaya ini maka lahirlah nilai, norma, dan prinsip yang berpengaruh terhadap kebijakan sebuah negara. Hindutva merupakan salah satu ideologi negara India yang sangat berpengaruh terhadap kebijakan di India. Seperti pada amandemen kewarganegaraan atau Citizen Amandemen Bill (CAB) pada tahun 2019 yang mana kebijakan ini dibuat berdasarkan ideologi Hindutva yang dinilai diskriminatif terhadap umat muslim karena kebijakan tersebut berisi tentang penetapan kewarganegaraan bagi umat Hindu, Sikh, Budha, Jain, Parsi dan Kristen. Dengan disahkannya kebijakan tersebut menjadi Citizen Amandemen Act (CAA), banyak imigran yang kehilangan status kewarganegaraannya. Penelitian ini didalamnya akan menganalisis mengenai Hindutva yang dapat mempengaruhi sebuah kebijakan di India yang juga berpengaruh terhadap status kewarganegaraan di India.

Kata Kunci: Hindutva, CAA, CAB, Kebijakan negara, Imigran, Undang Undang Amandemen

ABSTRACT

India is a country that has various religions and cultures. From these various religions and cultures, values, norms, and principles are born that influence the policies of a country. Hindutva is one of the ideologies of the Indian state that is very influential on policy in India. As in the Citizenship Amendment Bill (CAB) in 2019, this policy was made based on the Hindutva ideology which is considered discriminatory against Muslims because the policy contains the determination of citizenship for Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsi and Christians. With the passage of the policy into the Citizen Amendment Act (CAA), many immigrants lost their citizenship status. This research will analyze Hindutva which can influence a policy in India which also affects citizenship status in India.

Keywords: Hindutva, CAA, CAB, State policy, Immigrants, Amendment Act

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebijakan dalam sebuah negara mempunyai implementasi penting terhadap nasib sebuah negara serta keadilan social terhadap masyarakatnya. Tujuan di rumuskan nya kebijakan sebuah negara salah satu nya yaitu untuk mengutamakan kepentingan masyarakat dalam sebuah negara tersebut. Baik dari segi apapun, rumusan kebijakan sebuah negara harus sesuai dengan kepentingan masyarakatnya karena yang harus kita ketahui bahwasanya keunggulan suatu negara itu tergantung pada kebijakan negara itu sendiri. Namun dalam menetapkan kebijakan suatu negara kita perlu mengetahui apakah kebijakan tersebut layak atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam suatu negara tersebut. Dan yang berada dalam sebuah negara tersebut bukan hanya masyarakat atau penduduk asli, akan tetapi juga banyak migran dan imigran yang berdatangan dengan berbagai tujuan. Seperti pada hal nya di India banuak sekali imigran yang berstatus legal dan illegal.

Berbicara mengenai imigran di India, banyak sekali isu isu yang menggemparkan dunia internasional mengenai status para imigran di India. Banyak para imigran yang mengalami kasus diskriminasi dan terintimidasi oleh pemerintahan India itu sendiri. Seperti pada tahun 2019 kita di gemparkan oleh berita tentang Undang Undang Amandemen Warga Negara atau *Citizen Amandemen Act (CAA)* yang dibuat oleh pemerintah India dan di sah kan oleh Narendra Modi yang

merupakan perdana menteri India yang isinya tidak lain yaitu bertujuan untuk melindungi India itu sendiri dari para masyarakat asing yang datang ke India dengan

berbagai permasalahan. Salah satunya permasalahan agama ataupun masyarakat asing yang menjadi korban penganiayaan berbasis agama. Pada akhirnya terjadilah kerusuhan di India oleh para imigran terhadap Undang Undang yang baru diresmikan tersebut. Hal ini terjadi karena para imigran di India dan masyarakat non-hindu terutama masyarakat dan imigran muslim yang merasa tertindas dan tidak adanya

keadilan bagi masyarakat di India. Pada saat kejadian tersebut, banyak dari mahasiswa muslim di India yang di serang oleh aparat India (Saputra E. Y., 2019).

Dalam pembahasan kali ini saya akan berfokus terhadap kebijakan di India yang ada sangkut paut nya dengan Hindutva serta imigran muslim di India yang juga mengalami diskriminasi. Seperti yang kita ketahui pada kebijakan India pada akhir tahun 2019 telah dirubah dan menjadi sebuah kericuhan karena isi dari Undang Undang Amandemen tersebut dinilai sangat diskriminatif dan berusaha untuk menghapuskan nilai nilai Islam di India. Kericuhan ini bermula di Assam yang akhirnya meluas hingga ke seluruh India. Undang Undang Amandemen ini tentunya dinilai tidak berlaku adil terhadap para imigran legal maupun illegal. Karena pada dasarnya Undang Undang Amandemen ini ada pengecualian untuk anggota enam komunitas agama minoritas - Hindu, Sikh, Budha, Jain, Parsi dan Kristen – yaitu apabila mereka dapat membuktikan bahwa mereka berasal dari Pakistan, Afghanistan atau Bangladesh. Mereka hanya perlu tinggal atau bekerja di India selama enam tahun untuk memenuhi syarat kewarganegaraan melalui naturalisasi, proses di mana non-

warga negara memperoleh kewarganegaraan atau kewarganegaraan negara itu. Sedangkan masyarakat muslim dan imigran muslim tidak mendapatkan sebuah keadilan dalam Undang Undang tersebut (BBC News, 2019).

UU CAB (*Citizen Amandemen Bill*) pertama kali diperkenalkan di Parlemen pada Juli 2016, yang merupakan amandemen UU Kewarganegaraan dan kemudian menjadi (*Citizenship Amandemen Act*) CAA yang pada tahun 1955 menjadikan agama sebagai dasar kewarganegaraan. CAA ini disahkan pada bulan Desember 2019 yang pada akhirnya memicu sebuah konflik dan seluruh dunia protes seperti masyarakat sipil, beberapa partai politik dan tentunya masyarakat muslim yang merasa tertindas. Protes dari beberapa organisasi besar masyarakat India pun dilaksanakan dengan mengadakan sebuah petisi yang di tujukan kepada Mahkamah Agung dengan pernyataan bahwa Undang Undang tersebut illegal. CAA ini memiliki tujuan untuk mempercepat kewarganegaraan bagi warga Hindu, Parsis, Sikh, Budha, Jain, dan Kristen yang merasa teraniaya dan sudah berada di India sebelum tahun 2014. Sedangkan identitas umat muslim sengaja terus di tutup-tutupi oleh CAA dengan membuat kebijakan baru yang di dalamnya tidak disebutkan mengenai kehidupan layak untuk umat muslim dan para imigran muslim lainnya. Dari kericuhan ini cukup banyak memakan korban yang di antaranya terluka hingga meninggal karena melawan hukum. Pemicu dari kerusuhan ini diawali oleh Undang Undang Amandemen yang dinilai sangat diskriminatif karena Undang Undang Amandemen tersebut di sebut sebut sangat bertentangan dengan nilai sekuler negara dan memberikan kewarganegaraan berdasarkan agama. Seperti yang telah saya

jelaskan sebelumnya bahwa Pakistan, Bangladesh, dan Afghanistan merupakan tiga negara yang mendapat tawaran kewarganegaraan bagi imigran ilegal non-muslim. Dan untuk imigran yang berasal dari Komunitas Hindu, Sikh, Budha, Jain, dan Kristen, apabila mereka bisa membuktikan bahwa mereka kaum minoritas yang berasal dari negara mayoritas muslim seperti Pakistan, Afghanistan, dan Bangladesh maka mereka hanya diberi syarat untuk bekerja dan tinggal di India selama enam tahun. Padahal pada kebijakan India sendiri yaitu melarang imigran ilegal untuk menjadi warga negara India. Artinya Undang Undang Amandemen tersebut telah mengubah kebijakan India yang berusia 64 tahun. Dari hal ini dapat kita lihat bahwa banyak nya pro dan kontra dengan berbagai alasan yang memicu sebuah kericuhan (BBC News, 2020).

Selanjutnya mengenai NRC (National Register of Citizens) atau Daftar Warga Nasional yang pertama kali telah dibuat setelah sensus India 1951 dan hingga saat ini masih belum di perbaharui. NRC ini berlaku di daerah Assam dan di dalamnya berisi mengenai informasi demografis tentang warga negara India yang memenuhi syarat sesuai dengan Undang Undang Kewarganegaraan India 1955. NRC ini dibuat untuk sebuah data yang didalamnya berisi sebuah catatan dan data data resmi warga negara asli india. Yang mana NRC ini berfokus kepada kewarganegaraan di Assam dan berusaha untuk menjaga adat dan keunikan dari etnis mereka. Lalu pada tahun 2014, Mahkamah Agung mengadakan pembaruan NRC yang bertujuan untuk menghapus nama nama migran ilegal dari daftar pemilihan kewarganegaraan Assam (The Indian Express, 2021). Selain itu banyak usul dari para pemimpin BJP salah satunya Amit

Shah agar NRC ini dapat diterapkan di seluruh India atau dengan sebutan baru NRC Nasional. Ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi penyusup atau imigran ilegal yang telah tinggal di India lalu dengan kebijakan selanjutnya seperti menahan imigran ilegal tersebut dan mendeportasi mereka ke tempat asal mereka. Namun hingga saat ini, NRC Nasional ini belum di terapkan di seluruh India.

Jadi, yang perlu kita ketahui bahwasanya terdapat krisis kebijakan yang terjadi di India saat ini yaitu mengesampingkan kepentingan masyarakat muslim dan juga bagi para imigran muslim. Dapat kita lihat bahwasanya BJP mempunyai strategi tersendiri untuk menyingkirkan muslim di India dan secara tidak langsung cukup memecah belah umat di India. Dapat dilihat dalam penerapan NRC nasional yang sepertinya ingin mengubah India menjadi negara mayoritas Hindu. Hal ini juga dikarenakan setelah Narendra Modi mengesahkan CAB yang mungkin memiliki tujuan untuk mengutamakan Hindu atau menaikkan derajat Hindu di India. Tentu nya hal ini sangat berhubungan dengan ideologi Hindutva yang sangat anarkis dan ingin berkuasa di India berdasarkan ideologi nya.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana bagaimana pengaruh Hindutva terhadap kebijakan migrasi di India?

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mempelajari berbagai pengaruh Hindutva terhadap kebijakan di India
2. Secara khusus penelitian ini juga dilakukan untuk mengkaji lebih dalam sejarah Hindutva dan kebijakan di India terhadap masyarakat dan imigran di India
3. Menjelaskan intensitas terjadinya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah India dengan BJP (Partai Bharatiya Janata) dan Hindutva terhadap kebijakan India khususnya pada tahun 2019

1.4 Cakupan Penelitian

Dasar dari penelitian ini yaitu menjelaskan tentang bagaimana konflik dan kerusuhan yang terjadi di India ketika amandemen warga negara tersebut disahkan oleh Narendra Modi yaitu perdana menteri India. Konflik ini dipicu oleh Undang-Undang yang isinya dinilai sangat mengintimidasi para imigran dan masyarakat muslim pada tahun 2019. Selanjutnya mengenai kelompok Hindutva dan juga BJP yang sangat berpengaruh atas kebijakan yang terjadi di India dan juga terhadap imigran di India. Karena banyak imigran yang terdampak oleh kebijakan di India saat ini dan pula kaum minoritas yang tertindas.

1.5 Tinjauan Pustaka

Dalam jurnal yang berjudul “*INSTITUSI MINORITAS DAN STRUKTUR SOSIAL DI INDIA*” disebutkan bahwasanya terdapat tantangan dalam menangani sebuah

kebijakan di India agar kaum minoritas mendapatkan hak nya masing masing dalam berwarga negara sebagai masyarakat sipil sesuai dengan pembukaan Undang Undang Republik India yang telah termaktub di dalamnya. Akan tetapi masalah yang selalu di hadapi oleh India itu sendiri adalah mengenai hak dan keragaman budaya yang sulit menyatu dan kurang nya sikap toleransi antar agama dan masyarakat disana (Ulum, 2018).

Faktanya banyak sekali kasus yang tidak hanya masyarakat sipil di India, melainkan para imigran pun banyak terintimidasi bahkan status nya tidak di akui di India itu sendiri. Akhirnya banyak imigran ilegal yang tetap ingin tinggal di India seperti dalam tulisan skripsi oleh Andi Cintana yang berjudul “*PENINGKATAN KERJASAMA INDIA-BANGLADESH DALAM PENANGANAN IMIGRAN ILEGAL BANGLADESH INDIA*”. Sang penulis menyatakan bahwasanya fenomena migrasi penduduk Bangladesh ke India sudah terjadi sejak lama sekitar tahun 1971 disaat perang antara Bangladesh dengan Pakistan. Hal ini yang menyebabkan membludaknya para migran yang legal maupun ilegal. Dari kejadian ini, pemerintah India cukup was was dan merasa tidak aman dengan adanya para imigran ilegal yang akhirnya antar kedua negara tersebut melakukan hubungan kerjasama bilateral (Nurmilad, 2017).

Berbicara tentang imigran, adapun jurnal yg di tulis oleh Muhammad Fauzan Alamari yang berjudul “*IMIGRAN DAN MASALAH INTEGRASI SOSIAL*” yang banyak menjelaskan masalah mengenai imigran yang berpindah tempang dengan beberapa alasan pribadi dan karena keterpaksaan yang mengharuskan mereka untuk

pindah tempat seperti masalah keamanan negara. Selain itu masalah perekonomian juga bisa menjadi pemicu mengapa terjadinya migrasi. Dalam jurnal ini, penulis menjelaskan bahwasanya benua Asia merupakan benua imigran berasal dengan jumlah yang cukup besar dan banyak. Dan jika dilihat secara global, penulis menjelaskan bahwasanya India merupakan sebuah negara yang menjadi tempat persebaran penduduk yang di bilang cukup banyak dalam ranah internasional. Seperti yang kita ketahui bahwasanya imigran merupakan isu yang cukup menoleh perhatian dunia internasional karena mungkin bisa saja negara asalnya tidak memiliki keamanan atau pun over population sehingga lapak untuk mencari pekerjaan untuk bertahan hidup tidak memadai atau tidak mencukupi (Alamari, Imigran dan Masalah Integrasi Sosial, 2020).

Dan yang dapat kita lihat dalam jurnal oleh Hadza Min Fadhli Robby yang berjudul *“EXERCISING THE POLITICS OF SALVATION: ANALYZING FOREIGN POLICY RESPONSES OF INDIA AND TURKEY DURING HUMANITARIAN CRISES (2014-2019)”* bahwasanya India dan Turki membawa dalih agama dalam permasalahan politik. Ada juga beberapa ahli yang berpendapat bahwasanya agama juga dapat menyelesaikan konflik politik dan juga membangun perdamaian, artinya banyak perubahan dan sisi positif dalam melibatkan agama dalam permasalahan politik. Namun, tidak banyak juga yang berpendapat bahwasanya agama dan politik tidak bisa di gabungkan menjadi satu. India dan Turki sebagai sebuah negara yang menganut sistem sekularisme sebagai pandangan politik dimana Turki mengalami sebuah sekularisasi dengan menantang konsep laicisme, sedangkan India memiliki

pengalaman tersendiri dalam penyelarasan sekularisme oleh Inggris. Turki dan India merupakan sebuah negara yang masing masing memiliki musuh dalam lingkungan negara nya sendiri seperti Turki dengan Suriah dan India dengan Pakistan. Maka Turki dan India tersebut harus menguatkan identitas negara nya masing masing dan tentu saja berpengaruh dengan kebijakan negara nya (Robby, 2021).

Selain jurnal di atas, dapat kita lihat jurnal yang di tulis oleh Dr James Chiriyankandath yang berjudul “*RELIGIOUS NATIONALISM AND FOREIGN POLICY: INDIA AND ISRAEL COMPARED*” terdapat penjelasan mengenai hubungan politik luar negeri yang berpacu terhadap agama dan nasionalisme sehingga berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri. Dalam kebijakan luar negeri India dan Israel ini terdapat peran nasionalisme agama dengan keterbatasan ideologi yang di susun menjadi istilah Hindutva untuk India dan Eretz Israel untuk tanah Israel. Eretz Israel yang bermakna tentang kekerabatan antara Yahudi, sejarah dan hukum Yahudi berdasarkan tradisinya. Dalam jurnal ini dijelaskan mengenai peran agama dalam kebijakan luar negeri pada masing masing negara. Melihat bagaimana kebijakan India dan Israel pada negara nya sendiri dengan membawa dalih agama yang berfokus pada kepentingan sebuah negara sekuler dan nasionalisme (Chiriyankandath, 2007).

1.6 Landasan Teori

Untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah pada penelitian ini, penulis akan menggunakan *Decision Making Theory* atau Teori Pengambilan Kebijakan dari William D. Coplin tahun 1971. Teori ini digunakan oleh penulis untuk

menganalisis dan menjawab rumusan masalah pada penelitian ini karena penulis akan menganalisis bagaimana pengaruh Hindutva terhadap kebijakan migrasi India yang tentunya hal ini akan membahas mengenai Undang Undang Amandemen Kewarganegaraan India tahun 2019. Dalam hal ini, terdapat beberapa factor mengenai penyebab dilakukannya amandemen Undang Undang Kewarganegaraan tahun 1955 mengenai kebijakan migrasi. Maka dari itu, penggunaa teori *decision making* oleh William D. Coplin ini merupakan teori yang tepat untuk menganalisis penelitian ini.

William D. Coplin dalam bukunya yang berjudul *Introduction to International Politics; A Theoretical Overviw*, menjelaskan bahwa;

“To be interested in why states behave as they do interest area, we have to be interested in why their leaders make the decision. However, it would be mistake to think that foreign policy makers act in vacuum. On the contrary, any given foreign policy act may be viewed as the result of three board categories of considerations affecting the foreign policy decision makers state. The first is domestic politics within the foreign policy decision makers states. The second is economy and military capability of the state. The third is the international context the particular position in which his state finds it self specially in relation to other state in system.” (Coplin, 1971)

Maksud dari penjelasa Coplin di atas yaitu bahwasanya mengapa suatu negara dapat mengambil kebijakan atau berperilaku sesuai dengan wilayah kepentingan mereka, dan juga kita harus memahami mengenai apa yang melatar belakang para

pemimpin dari suatu negara tersebut sehingga mereka membuat keputusan sesuai dengan kepentingan mereka. Maka dari itu, pengaruh kebijakan luar negeri dapat dilihat melalui tiga faktor. Pertama, Domestic Politics atau kondisi politik domestik negara yang mengeluarkan kebijakan. Kedua, yaitu Economy and Military Capability atau kekuatan ekonomi dan militer negara yang mengeluarkan kebijakan. Ketiga, International Context atau konteks internasional.

a. Kondisi Politik dalam negeri

Dalam konteks ini, politik dalam negeri merupakan sebuah faktor penentu suatu kebijakan yang dapat memberikan pengaruh besar dalam merumuskan suatu kebijakan luar negeri negara tersebut. Selain itu, Coplin berpendapat bahwa *“to determine the way foreign policy works, it can be observed from the domestic situation of a country”*. Maksudnya yaitu bahwa Coplin ingin menjelaskan kondisi dalam negeri suatu negara seperti sistem pemerintahan, budaya dalam negara tersebut, ataupun pandangan politik negaranya dapat mempengaruhi keputusan suatu kebijakan luar negeri. Kondisi politik internal suatu negara pastinya akan memberikan pengaruh besar dalam merumuskan suatu kebijakan luar negeri negara tersebut karena kondisi politik suatu negara tidak akan lepas dari aktor politik.

Jadi meskipun aktor dari pengambilan kebijakan adalah negara, akan tetapi yang bertanggung jawab dalam membuat sebuah keputusan kebijakan

dalam sebuah negara adalah manusia. Dan perlu kita ketahui bahwasanya factor budaya yang fundamental akan berpengaruh terhadap perilaku masyarakat dan pastinya juga berpengaruh terhadap kondisi politik domestic.

Dalam mengaplikasikan teori ini terhadap penelitian, penulis akan membahas bagaimana kondisi politik India yang dipengaruhi oleh nilai nilai Hindutva sehingga terjadi kebijakan baru yaitu Undang Undang Amandemen Kewarganegaraan 2019 yang mana kebijakan baru ini banyak menuai kontroversi di hamper seluruh wilayah India.

b. Kondisi ekonomi dan militer

Konteks kondisi ekonomi dan militer ini maksudnya yaitu bahwa suatu negara harus mempunyai kemampuan dan harus bersedia mewujudkan kemampuan yang diperlukan oleh negara untuk menopang politik luar negrinya. Factor geografis juga selalu medasari pertimbangan pertahanan dan keamanan.

Perlu kita ketahui bahwasanya Coplin dalam bukunya menjelaskan bahwa kekuatan ekonomi dan militer suatu negara akan berpengaruh terhadap proses perumusan suatu kebijakan luar negri negara tersebut.

Dalam mengaplikasikan teori ini terhadap penelitian, penulis akan memahami dan membahas mengenai kondisi perekonomian India dan juga kekuatan militer India mengapa kebijakan migrasi tersebut dibuat.

c. Konteks international

Perlu kita ketahui bahwasanya ada tiga elemen penting dalam membahas konteks internasional terhadap politik luar negeri suatu negara, yaitu: geografis, ekonomi, dan politis. Tiga unsur ini tentunya juga sangat berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri suatu negara.

Dalam mengimplementasikan teori ini terhadap penelitian, penulis akan membahas bagaimana proses pengambilan kebijakan India yang menggunakan nilai nilai Hindutva serta imbas dari kebijakan kewarganegaraan ini terhadap imigran terutama imigran muslim India.

Teori *desicon making* oleh Coplin ini digunakan untuk menganalisis satu negara dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri dari suatu negara dan juga factor apa saja yang dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan luar negeri pada suatu negara tersebut. Maka dari itu pada penelitian ini penulis akan berfokus pada satu negara saja yaitu India, yang mana pada tahun 2019 India telah mengesahkan kebijakan migrasi yang dinilai sangat diskriminatif terhadap muslim.

1.7 Argumen Sementara

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan sejauh ini, penulis berargumen bahwasanya adanya kekuatan militer India dan meningkatnya perekonomian India pada era Narendra Modi ini membuat Modi beserta pada pendukungnya seperti BJP dan RSS semakin berani untuk mengamandemen Undang Undang Kewarganegaraan pada tahun 2019 yang isi dari Undang Undang tersebut mendiskriminasi umat muslim terutama para imigran muslim di India. Selain itu kebijakan migrasi ini dibuat dengan menggunakan nilai nilai Hindutva dimana Hindutva ini banyak melakukan kekerasan demi menegakan ideologinya sebagai ideologi nasionalisme keagamaan di India yang mana ideologi Hindutva ini ingin menjadikan India seluruhnya menjadi negara yang beragama Hindu. Undang Undang Kewarganegaraan 2019 ini pada dasarnya hanya memperbolehkan imigran minoritas dari tiga negara muslim yaitu Pakistan, Afghanistan dan Banglades. Selain itu, Undang Undang Amandemen Kewarganegaraan atau CAB (*Citizen Amandemen Bill*) yang telah disahkan menjadi CAA (*Citizen Amandemen Act*) ini menuai banyak kecaman di hampir seluruh wilayah India terutama. Dan bagi yang menentang CAA ini akan ikut didiskriminasi juga. Hal ini tentunya menjadi sorotan seluruh dunia dimana pada pengesahan CAA ini banyak terjadi kerusuhan hingga banyak yang kehilangan nyawa.

1.8 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari empat bab yang pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab 1 adalah bab pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan, Tujuan, Cakupan, Tinjauan Pustaka, Landasan Konsep, dan Sistematika Pembahasan.

Bab 2 menjelaskan mengenai pengaruh Hindutva dan Partai Politik Era Narendra Modi.

Bab 3 adalah pembahasan mengenai analisi Kebijakan Kewarganegaraan yang dipengaruhi oleh nilai nilai Hindutva beserta factor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut dibuat.

Bab 4 merupakan kesimpulan dari keseluruhan bab sebelumnya.

1.9 Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan cara mengumpulkan data – data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yang nantinya akan dikembangkan dan digunakan untuk mendapatkan kesimpulan.

b. Subjek

Subjek dari penelitian ini adalah India yang memiliki banyak sejarah yang akan di gali.

c. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini yaitu partai politik India yang bersangkutan dan juga kelompok Hindutva.

d. Metode Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari media tulis seperti artikel, buku, jurnal, maupun berita yang relevan dengan penelitian ini.

e. Proses Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data akan dilakukan melalui literatur – literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.



BAB 2

IDEOLOGI HINDUTVA DAN PENGARUH PARTAI POLITIK INDIA ERA NARENDRA MODI

Pada bab ini akan di jelaskan mengenai Hindutva secara mendalam tentang bagaimana Hindutva muncul hingga menjadi sebuah ideologi nasionalisme di India. Dan pada sub bab ke dua terdapat penjelasan mengenai organisasi masyarakat yang sangat berpengaruh di India (RSS) hingga partai politik (BJP) yang mendukung **ideologi Hindutva tersebut serta pengaruhnya pada era Narendra Modi.**

2.1. Hindutva sebagai Ideologi Nasionalisme Keagamaan di India

Dalam sejarah India, pada abad ke-tujuh agama Islam mulai masuk ke India. Agama islam ini sendiri mulai di kenal oleh seluruh wilayah benua India karena agama Islam ini sendiri membawa sebuah peradaban yang cukup berkembang pada masanya. Namun, seperti yang kita ketahui bahwasanya di India mempunyai sebuah peradaban khas dengan sebuah sistem kasta dalam agama. Budha dan Hindu Brahmatik merupakan salah dua peradaban yang sudah ada di India sejak lama. Dua peradaban atau keyakinan India ini juga berpengaruh terhadap partai politik dan organisasi masyarakat India seperti elite politik Rajput dan elite politik Hindu. Setelah agama Islam masuk ke India yang kemudian membawa sebuah peradaban baru ini, India mulai terpecah menjadi beberapa kelompok yang melahirkan sebuah integritas politik dengan peradaban khas muslim (Samrin, 2018).

Agama mayoritas India yaitu Hindu sebagai Hinduisme yang bermaksud sebagai nama yang diberikan kepada agama paling kuno dan bertahan di anak benua India, dan Hindutva adalah nama untuk ideologi kanan Hindu, yang diwakili atau di dukung oleh partai politik Partai Bharatiya Janata, atau Partai Rakyat India (BJP). Pada dasarnya, Hindutva merupakan sebuah struktur dari Hinduisme namun Hindutva berbeda dengan Hinduisme. Perbedaan dasarnya yaitu bahwa Hinduisme merupakan sebuah agama sedangkan Hindutva merupakan nasionalisme Hindu yang berdiri di India sebagai ideologi politik (Sharma, 2020).

Salah satu peradaban yang muncul di India yaitu Hindutva Gerakan nasionalis Hindu yang bahwasanya Hindutva ini telah ada sejak dulu hingga saat ini. Hindutva ini dikenal dengan kontroversial yang di bilang banyak membuat takut masyarakat minoritas bahkan banyak nya minoritas yang merasa di diskriminasi dengan adanya Hindutva tersebut. Hal ini di sebabkan karena tujuan kelompok Hindutva untuk menjadikan ideologi nya menjadi sebuah kebijakan baru untuk India tanpa memperdulikan masyarakat minoritas di India dan juga dengan tujuan yang tumpang tindih dengan berbagai hal dan perbedaan yang muncul (sheni, 2003). Namun, Ideologi Hindutva ini mendapatkan dukungan dari pemerintah dan RSS (Rashtriya Swayamsevak Sangh) yang pada akhirnya membuat ideologi Hindutva menjadi berkembang. Kehadiran Hindutva kini pun yang dulu nya di anggap aneh, namun sekarang memiliki kedudukan di India.

Ideologi Hindutva muncul pada tahun 1923 oleh Vinayak Damodar Savakar pada abad 19-20. Ideologi Hindutva merupakan sebuah ideologi yang bertujuan untuk menegakkan hegemoni umat hindu dan berupaya untuk mendefinisikan atau membudayakan budaya India dalam artian terhadap nilai nilai Hindu. Kini Hindutva dianggap sebagai kasta tinggi dan bahkan dianut oleh banyak orang Hindu yang duduk dikalangan kasta tinggi. Dan telah menyebar di pusat pusat kota India. Istilah Hindutva menyatukan orang orang di India berdasarkan kepercayaan masyarakatnya di India sebagai “Tanah Suci”. Dalam definisi ini masyarakat India yang beragama Hindu, Sikh, dan Budha berhak menyebut diri mereka sebagai golongan dari Hindutva. Sedangkan masyarakat Kristen dan Muslim tidak termasuk dalam definisi ini (Savarkar S. V., 1883-1966). Jadi, bisa dikatakan bahwasanya masyarakat Islam dan Kristen secara tidak langsung harus bergabung dalam golongan Hindutva ini, jika tidak maka status kewarganegaraannya akan dicabut.

Hindutva merupakan gerakan nasionalisme Hindu di India dan sekarang keberadaannya semakin kuat dengan kebijakan kebijakan oleh Narendra Modi. Hindutva dalam Gerakan nasionalnya yaitu ingin membangun sebuah negara dengan satu agama yaitu Hindu (Nasution, 2021). Hindutva memiliki pandangan terhadap muslim di India bahwasanya masyarakat muslim atau minoritas di India bisa saja menghancurkan sebuah demokrasi dan menurunkan kualitas masa depan. Maka dari itu munculah Undang Undang Amandemen Kewarganegaraan yang disebut sebagai Undang Undang anti muslim dan mendiskriminasi muslim. Jadi, Undang

Undang Amandemen ini bertujuan untuk mengumpulkan umat Hindu yang berada di luar India untuk masuk menjadi warga negara India. Sedangkan masyarakat muslim atau minoritas India di usir dan di jadikan pengungsi di Pakistan, Banglades, atau Afghanistan. Kebijakan Modi terhadap muslim sangat menuai kontroversi karena telah merengguh hak muslim seperti menarik otonom pada wilayah Kashmir dan Jammu. Kemudian kedua wilayah tersebut di jadikan daerah darurat militer, kemudian rumah para muslim di jarrah hingga di bakar.

Hidutva yang di populerkan oleh Vinayak Damodar Savarkan memiliki beberapa pendapat yang menurutnya bahwa bangsa Hindu dapat di taklukan, di jajah hingga di hina karena besarnya keberagaman mereka dan kurangnya persatuan antara mereka. Jadi menurut Savarkar sendiri jika ingin menjadi kuat dan Kembali jaya maka diperlukan ideologi pemersatu yang kuat dan musuh yang jelas pula. Dari pendapatnya tersebut, Savarkar terinspirasi dari sejarah Panjang India dengan interaksinya dengan peradaban peradaban Islam.

Pada dasarnya, Mahatma Gandhi memperjuangkan India walaupun India merupakan bangsa yang meliputi banyak dan beragam agama dan pada saat itu Mahatma Gandhi berpihak kepada Pakistan. Ghandi juga menolak dengan adanya gagasan Hindutva yang di bawa oleh Savarkar yang menyuarakan dan memperkenalkan Hindutva sebagai nasionalisme Hindu (Samuel, 2020). Hal ini di karenakan nasionalisme Hindu menginginkan India menjadi negara Hindu, dengan Hindu sebagai dasar pemersatu, cara hidup, dan identitas. Hindutva mengklaim orang

Hindu adalah "penduduk asli" Hindustan. Agama-agama lain yang lahir di India, seperti Sikhisme, Jainisme, dan Buddha, masih merupakan bagian dari agama Hindu. Menurut Gandhi dengan pandangan yang di kemukakan oleh Savarkar sendiri tidak pantas untuk di realisasikan di India yang memiliki berbagai macam agama dan budaya. Para pendukung nasionalisme Hindu juga telah memproyeksikan Hindutva sebagai kekuatan pemersatu budaya dengan sejarah yang berbeda. Dimana kepentingan Hindu bertentangan dengan kepentingan muslim dan sikap anti muslim yang lebih menonjol (Brekke, 2019).

2.2. Hubungan Hindutva dan BJP (Bharatiya Janata Party) di Pemerintahan Narendra Modi

Perlu kita ketahui bahwasanya Hindu merupakan kaum mayoritas India yang keberadaannya di dukung oleh para aktivis dan beberpa partai nasional seperti BJP (Bharatiya Janata Party). BJP ini merupakan sebuah partai politik yang sangat berpengaruh dan sangat menonjol karena Partai Bharatiya Janata Party ini merupakan sebuah partai politik tersebar di India yang di bentuk pada tahun 1980. Pemimpin pertamanya adalah Mr. Atal Bihari Vajpayee. BJP ini juga berasal dari sebuah organisasi terkenal dengan sebutan "Sangh Parivar" yang di dalamnya juga ada sebuah organisasi dari peraduan kesatuan nasional India yaitu RSS (Rashtriya Swayamsevak Sangh). RSS ini bisa di katakan sebagai sebuah karakter India yang

menjunjung identitas nasional India dan juga merupakan sebuah kekuatan nasional karena pada dasarnya RSS merupakan sebuah kelompok nasionalisme Hindu sayap kanan dan mendapat julukan dengan sebutan “communal”.

Sebelum lanjut lebih dalam, Shanjiv Bhatt yang merupakan seorang mantan polisi India yang pernah mendapatkan intruksi dari Modi kini di penjara. Hal ini dikarenakan oleh adanya tuduhan Shanjiv Bhatt terhadap Narendra Modi yang ikut terlibat dalam peristiwa Ghujarat dan menewaskan banyak minoritas terutama umat muslim. Perlu kita ketahui bahwasanya kerusuhan Ghujarat disebabkan oleh tuduhan umat Hindu (Saputra A. M.). Tuduhan tersebut berupa bahwasanya umat muslim membakar kereta api yang isinya peziarah Hindu. Dari peristiwa tersebut banyak peziarah Hindu yang terbakar hidup-hidup dan membuat umat Hindu murka sehingga ingin membalas dendam kepada umat muslim (BBC News, 2019). Dan terjadilah radikalisme Hindu dimana Modi menjadi perdana menteri India dari partai BJP. Momen ini menjadi kebangkitan ekstrimisme Hindu di India karena BJP merupakan partai yang berhaluan agamis dan nasionalis. Modi pun mulai berkuasa dan memiliki banyak strategi Bersama BJP hingga berbagai institusi public di kooptasi demi kepentingan mereka.

Sebelum terjun ke politik, Narendra Modi merupakan anggota RSS. Dan Ketika itu Modi merupakan salah satu orang yang sangat berpengaruh sehingga RSS berusaha membentuk pandangan Modi terhadap politiknya dan mendorong Modi untuk masuk

ke BJP. Selain itu RSS juga telah menaruh anggota yang telah di pilih untuk berkedudukan di posisi yang strategis.

RSS yang berdiri pada tahun 1925 ini pada dasarnya bukanlah partai politik melainkan sebuah organisasi masyarakat kedua yang amat sangat berpengaruh di India. Selain itu kepolisian India juga menjalin Kerjasama dengan organisasi masyarakat India garis keras. RSS dapat dikatakan sebagai organisasi masyarakat yang sangat kuat dan berpengaruh kedua di India karena anggotanya sendiri di bina dan di latih secara mental dan fisik dari persuasi hingga indoktrinasi. Selain itu anggota RSS ini juga di latih seperti para militer yang meligitimasi kekerasan apabila di perlukan. Bahkan tidak jarang bahwa kaum Hindu toleran dapat menjadi target kekerasan (Kulkarni, 2018).

Banyak dari pemimpin BJP merupakan aktivis Hindu yang tentu nya berasal dari RSS. Maka dari itu BJP mengkalim dirinya sendiri sebagai partai sekuler yang sangat menjunjung tinggi umat Hindu hingga akhirnya mereka menindas masyarakat minoritas terutama umat muslim India. Namun, perlu kita ketahui bahwa BJP ini sangat licik dan dapat menutupi kesalahannya dalam mendiskriminasi kaum minoritas dengan cara berkontribusi dan seolah olah menjadi pahlawan bagi India dengan cara mengatasi berbagai macam konflik yang terjadi di India. Dari hal ini kaum minoritas merasa di lindungi karena BJP ini di nilai sangat berjasa dalam menghadapi dan menangani konflik konlik yang terjadi di India sehingga kaum minoritas masih tetap dapat memberikan suaranya untuk BJP itu sendiri. Padahal

dapat kita lihat bahwa hal itu merupakan sebuah cara dalam hal perpolitikan untuk mengambil hati kaum minoritas. Dan yang perlu kita ketahui pula bahwasanya BJP ini sangat menentang kaum minoritas yang tidak sepemikiran atau setuju dengan ideologi Hindutva. Dari sinilah ideologi Hindutva di nilai sangat mengerikan karena mendiskriminasi kaum minoritas India.

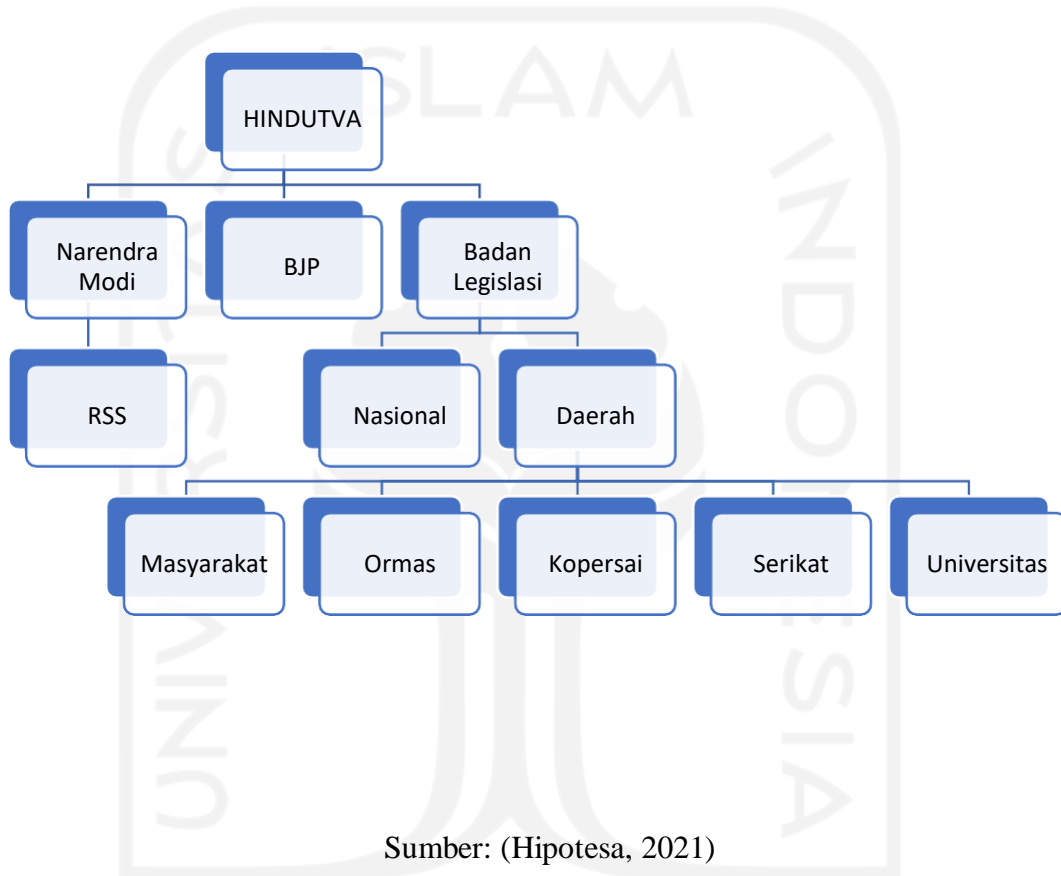
Pada tahun 2014 India memiliki sayap politik RSS (Rashtriya Swayemsevak Sangh) yang salah satu anggota dari RSS ini membunuh Mahatma Gandhi pada tahun 1948 dan pada saat masa jabatannya waktu itu ratusan muslim banyak yang terbunuh. Perlu kita ketahui bahwasanya pada abad ke-11 M, para penguasa muslim banyak yang memerintah India. Ekstremisme Hindu muncul sejak tahun 2014. Yaitu orang-orang Hindu yang ingin menjadikan negara India seluruhnya bernduduk agama Hindu. Agama lain dipaksa untuk mengikutin dan menerapkan cara hidup mereka sehari-hari dan meniru agama mereka. Tidak hanya masyarakat muslim, orang Kristen di India juga dipaksa untuk melakukan hal seperti itu. Contoh hal ekstreme yang dilakukan oleh ekstremisme Hindu seperti kerusuhan, pembunuhan hingga pengeboman di berbagai wilayah. Nah, dari kelompok ekstremisme Hindu ini munculah kelompok-kelompok terror saffron yang tujuan awalnya ingin menjadikan negara India sepenuhnya beragama Hindu (Ramachandran, 2020). Teror saffron kini telah meningkat seiring berjalannya waktu dan semakin melunjak pada awal tahun 2020. Situasi semakin memburuk dan militant Hindutvan akan menjadi ancaman keamanan utama dalam waktu dekat. Saffron Terror adalah analogi yang digunakan

untuk menggambarkan tindakan terorisme yang dimotivasi oleh nasionalisme Hindu atau Hindutva.

Hindutva membawa pengaruh besar terhadap kebijakan India yaitu CAA. Budaya Hindutva juga akhir akhir ini mencuat kembali seiring dengan pengesahan CAA. Imigran muslim menjadi sasaran utama Hindutva yang dikenal sebagai teroris yang terus menerus menyerang dan menindas tanpa belas kasihan. Hingga pada akhirnya muncul lah sebuah terror yang dinamakan terror Saffron. Adapun Saffronisasi kurikulum India di bawah rezim Modi akan terus meradikalisasi generasi umat Hindu yang akan datang, sehingga menyediakan pasokan fanatik yang rela mati dan membunuh demi keyakinan mereka. Seperti madrasah Taliban di mana ideologi kekerasan diajarkan, RSS memiliki lebih dari 25.000 seminar Hindu di seluruh India yang mengajarkan kebencian dan intoleransi kepada lebih dari 5-6 juta siswanya. Hal ini dilakukan salah satunya untuk melindungi kerajaan Hindu di Nepal (Iqbal K. , 2019). Budaya Hindutva yang menciptakan terror Saffron ini merupakan sebuah ancaman besar bagi umat muslim terutama para imigran muslim di India yang pada akhirnya banyak imigran muslim yang kehilangan status kewarganegaraannya. Dan yang seperti kita ketahui bahwasanya budaya Hindutva dan terror saffron telah menimbulkan banyak kericuhan hampir di seluruh wilayah India hingga menimbulkan banyak korban tertindas, terdiskriminasi, hingga meninggal dunia yang juga di akibatkan oleh pengesahan CAA 2019 di Lok Sabha.

Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan dalam table sebagai berikut :

Table 1: Denah Kekuasaan Hindutva



Sumber: (Hipotesa, 2021)

BAB 3

ANALISIS KEBIJAKAN HINDUTVA TERHADAP CAA (Citizen Amandemen Act)

Pada bab ini, peneliti akan membahas dan menjelaskan tentang bagaimana Undang Undang Amandemen Kewarganegaraan India tahun 2019 dapat mempengaruhi kebijakan dan status imigran di India dengan menggunakan teori *Decision Making Process* oleh William D. Coplin. Penggunaan teori ini ditengah tori yang lainnya adalah karena teori ini memiliki factor yang cukup jelas untuk menjawab rumusan masalah yang mana teori ini dapat menganalisis cara pengambilan keputusan pembuatan kebijakan pada suatu negara terhadap sebuah isu. Selain itu peneliti juga akan memaparkan hasil analisis mengenai factor factor yang mempengaruhi sebuah kebijakan, serta kepentingan kebijakan India terkait Undang Undang Amandemen 2019 dan juga pengaruh Hindutva terhadap kebijakan India. Pada penelitian ini Hindutva juga memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap berbagai kebijakan pemerintah India yang berimbas kepada imigran di India. Hal ini tentu berbeda jika dibandingkan teori yang lain seperti neorealisme yang mempertahankan nilai realis yang bahwasanya dunia merupakan sebuah tempat konfliktual dan antagonistic yang disebabkan oleh struktur anarkis dalam hubungan internasional. Akan tetapi, dalam penelitian ini terdapat pembahasan penting mengenai factor dan actor apa saja yang dapat mempengaruhi suatu kebijakan di dalam negara itu sendiri. Seperti yang dikemukakan oleh William D. Coplin

bahwasanya *decision making theory* ini dibuat untuk dapat memahami mengapa suatu negara dapat membuat kebijakan sesuai dengan kepentingan mereka dalam artian kepentingan pemerintah maupun kepentingan politisi atau masyarakat dan juga memahami apa yang melatar belakangi para pemimpin suatu negara membuat kebijakan tersebut. Maka dari itu, pada penelitian ini, peneliti akan menjawab rumusan masalah sesuai dengan teori yang telah dikemukakan oleh William D. Coplin dimana terdapat tiga kategori yang mempengaruhi pembuatan kebijakan pada suatu negara dan akan dibahas dan diimplementasikan pada bab ini.

Pada bab sebelumnya terdapat penjelasan mengenai partai politik India yaitu BJP terkait perumusan Undang Undang Amandemen India tahun 2019 dan organisasi masyarakat yang sangat berpengaruh di India yaitu Hindutva yang keberadaannya sebagai ideologi nasionalisme India.

Dan untuk menjawab rumusan masalah, peneliti akan membagi pembahasan dalam tiga sub bab. Pertama, bagaimana kondisi politik domestic India. Kedua, bagaimana kapabilitas ekonomi dan kekuatan militer India berpengaruh terhadap pembuat kebijakan di India. Ketiga, dalam konteks internasional yaitu bagaimana kualitas pengaruh Hindutva terhadap kebijakan Undang Undang Kewarganegaraan tahun 2019 di India.

3.1 Kondisi Politik Domestik India

Pada pembahasan ini, terdapat actor dan juga factor yang berpengaruh terhadap kebijakan India. Selain itu pada pembahasan ini terdapat penjelasan mengenai kondisi politik, sistem pemerintahan maupun budaya di India yang mempunyai pengaruh besar terhadap kebijakan India.

Perlu kita ketahui sedikit bahwasanya politik Islam pernah mengalami kehancuran di India dan menjadi salah satu penyebab kemunduran umat Islam di India. Pada dasarnya, India merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak nomer tiga di dunia setelah Indonesia dan Pakistan. Jejak Islam pun di India masih bisa terlihat seperti arsitektur bangunan dan nama jalan di India yang berbau Islam. Hal ini dikarenakan Islam pernah berkuasa di India selama beberapa abad. Akan tetapi, mayoritas penduduk India tetap beragama Hindu. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan beberapa hal, yaitu pertama jika dilihat dari sejarah peradaban Islam di India bahwasanya Islam pernah membentuk sebuah elite politik namun hanya memiliki sedikit pendukung di India. Dan kedua, penguasa local dan elite keagamaan Brahmana tetap mempertahankan kekuasaan politik local di bawah pemerintahan Islam. Selain itu juga identitas non-Muslim tetap terjaga (Nasrullah, 2020).

Sistem pemerintahan India yaitu merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan Republik Federal Parlementer dimana kepala negaranya adalah Presiden yang dipilih secara tidak langsung oleh Parlemen untuk masa jabatan 5 tahun. Sedangkan kepala pemerintahannya adalah seorang Perdana Menteri yang dipilih melalui pemilihan umum legislative setiap 5 tahun sekali. Biasanya di India,

Perdana Mentri nya merupakan pemimpin partai atau koalisi besar yang memenangi pemilihan umum legislatif (Dickson, 2022).

Dari penjelasan di atas, Narendra Modi dipilih menjadi seorang Perdana Menteri dan Narendra Modi sendiri berasal dari BJP. BJP atau *Bharatiya Janata Party* merupakan partai politik terbesar dan paling berpengaruh di India dan sebelumnya penulis telah menjelaskan sedikit mengenai BJP di bab 2 bahwasanya BJP ini berdiri pada tahun 1926 oleh Mr. Atal Bihari Vajpaye. BJP ini juga menggunakan ideology Hindutva dan merupakan partai sayap kanan India dan didalamnya terdapat organisasi masyarakat yang mendukung yaitu RSS atau *Rashtriya Swayamsevak Sangh*.

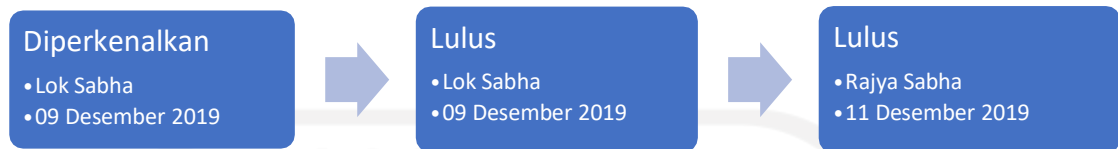
Setelah Modi menjadi Perdana Menteri India, terjadilah kebangkitan ekstrimisme Hindu di India dengan Ideologi Hindutva Bersama BJP sebagai pendukung utama berdirinya Modi sebagai Perdana Menteri India. Modi semakin dikenal karena kebenciannya terhadap Muslim dan India pun telah banyak melakukan kejahatan dan kebencian terhadap muslim India terutama imigran muslim. Maka dari ini, Modi secepat mungkin melakukan amandemen Kewarganegaraan India tahun 2019 atau disebut dengan CAA (*Citizen Amandemen Act*).

Pada analisis mengenai kondisi politik domestic India, Perlu kita ketahui bahwa Rancangan Undang Undang Amandemen 2019 atau CAB (*citizen amandemen bill*) menuai banyak kecaman dari masyarakat minoritas India terutama para imigran muslim yang merasa terdiskriminasi atas pembaruan kebijakan tentang kewarganegaraan India tahun 2019 saat itu. Pada dasarnya Undang Undang

Kewarganegaraan India 1955 mengatur siapa saja yang dapat memperoleh kewarganegaraan India berdasarkan tujuan masing masing individu. Hal ini berarti migran tidak dapat mendapatkan status kewarganegaraan India sedangkan imigran tidak serta merta mendapatkan status kewarganegaraan India. Dan yang berhak mendapatkan kewarganegaraan yaitu hanya warga negara India yang telah lahir di India atau warga negara yang memiliki keturunan India dan juga imigran minoritas yang berasal dari tiga muslim yaitu Afghanistan, Bangladesh dan Pakistan.

Dalam politik domestic India mengenai Rancangan Undang Undang, pada tahun 2016 RUU Kewarganegaraan India telah di perkenalkan untuk mengamandemen Undang Undang Kewarganegaraan pada tahun 1955 lalu di rujuk ke Komite Gabungan Parlemen dan laporannya diserahkan pada tanggal 7 Januari 2019 dan setelah itu di perkenalkan di Lok Sabha pada Desember 2019.

Table 2: RUU Kewarganegaraan (Amandemen) 2019, Kementrian; Urusan Dalam Negri



Sumber: (The Hindu Net Desk, 2019)

Pada proses pengesahan RUU Kewarganegaraan ini, menteri dalam negeri yaitu Amit Shah mengatakan bahwasanya undang undang amandemen kewarganegaraan ini berupaya untuk bersikap adil kepada minoritas yang terdiskrimansi dalam memberikan status kewarganegaraan tanpa menghilangkan status kewarganegaraan siapapun dan tentunya menolak tuduhan bahwaanya Undang Undang kewarganegaraan tersebut melawan dan mendiskriminasi muslim dan imigran muslim lainnya (The Hindu Net Desk, 2019).

Namun, dapat kita lihat mengenai perbandingan antara RUU 2016 sebagaimana telah disahkan di Lok Sabha dengan RUU 2019 sebagai berikut;

Table 3: Perbandingan RUU Kewarganegaraan (Amandemen), 2016 yang disahkan di Lok Sabha, dengan RUU (Amandemen) Kewarganegaraan, 2019

<p align="center">RUU Kewarganegaraan (Amandemen), 2016 (sebagaimana disahkan oleh Lok Sabha)</p>	<p align="center">RUU Kewarganegaraan (Amandemen) 2019</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Kelayakan kewarganegaraan untuk migran ilegal tertentu : Undang-undang melarang migran ilegal memperoleh kewarganegaraan India. Migran ilegal adalah orang asing yang memasuki India tanpa paspor atau dokumen perjalanan yang sah, atau tinggal di luar waktu yang diizinkan. • RUU tersebut mengamandemen Undang- 	<ul style="list-style-type: none"> • RUU tersebut menambahkan dua ketentuan tambahan tentang kewarganegaraan bagi para migran ilegal yang menganut agama-agama tersebut dari ketiga negara tersebut. • Konsekuensi memperoleh kewarganegaraan : RUU mengatakan bahwa pada memperoleh kewarganegaraan: (i) orang tersebut akan dianggap warga negara India sejak tanggal masuk mereka ke India, dan (ii) semua proses hukum terhadap mereka sehubungan dengan migrasi

<p>undang untuk menetapkan bahwa umat Hindu, Sikh, Buddha, Jain, Parsi, dan Kristen dari Afghanistan, Bangladesh, dan Pakistan tidak akan diperlakukan sebagai migran ilegal. Untuk mendapatkan manfaat ini, mereka juga harus dibebaskan dari Undang-Undang Orang Asing, 1946 dan Undang-Undang Paspor (Masuk ke India), 1920 oleh pemerintah pusat. Undang-undang tahun 1920 mengamankan orang asing untuk membawa paspor, sedangkan Undang-undang tahun 1946 mengatur masuk dan keluarnya orang asing di India.</p>	<p>ilegal mereka atau kewarganegaraan akan ditutup.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengecualian : Lebih lanjut, RUU tersebut menambahkan bahwa ketentuan tentang kewarganegaraan bagi migran ilegal tidak akan berlaku di wilayah suku Assam, Meghalaya, Mizoram, atau Tripura, sebagaimana tercantum dalam Jadwal Keenam Konstitusi. Wilayah suku ini meliputi Karbi Anglong (di Assam), Perbukitan Garo (di Meghalaya), Distrik Chakma (di Mizoram), dan Distrik Wilayah Suku Tripura. Ini juga tidak akan berlaku untuk area di bawah Garis Dalam” di bawah Peraturan Perbatasan Timur Bengal, 1873. Izin Jalur Dalam mengatur kunjungan orang India ke Arunachal Pradesh, Mizoram, dan Nagaland.
--	--

<ul style="list-style-type: none"> • Lebih lanjut RUU tersebut menyatakan sejak tanggal diundangkan, semua proses hukum yang tertunda terhadap migran ilegal tersebut akan ditutup. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Kewarganegaraan melalui naturalisasi : Undang-undang mengizinkan seseorang untuk mengajukan kewarganegaraan melalui naturalisasi, jika orang tersebut memenuhi kualifikasi tertentu. Salah satu kualifikasinya adalah bahwa orang tersebut harus telah tinggal di India atau berada di dinas pemerintah pusat selama 12 bulan terakhir dan setidaknya 11 tahun dari 14 tahun sebelumnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • RUU lebih lanjut mengurangi periode naturalisasi untuk kelompok orang tersebut dari enam tahun menjadi lima tahun.

<ul style="list-style-type: none"> • RUU tersebut membuat pengecualian bagi umat Hindu, Sikh, Buddha, Jain, Parsis, dan Kristen dari Afghanistan, Bangladesh, dan Pakistan, terkait dengan kualifikasi ini. Untuk kelompok orang ini, persyaratan 11 tahun akan dikurangi menjadi enam tahun. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Alasan untuk membatalkan pendaftaran OCI : Undang-undang menetapkan bahwa pemerintah pusat dapat membatalkan pendaftaran OCI dengan lima alasan termasuk pendaftaran melalui penipuan, menunjukkan ketidakpuasan terhadap Konstitusi, terlibat dengan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sama seperti RUU 2016 yang disahkan oleh Lok Sabha.

musuh selama perang, kebutuhan demi kepentingan kedaulatan India, keamanan negara atau kepentingan umum, atau jika dalam waktu lima tahun sejak pendaftaran OCI telah dijatuhkan hukuman penjara selama dua tahun atau lebih. RUU tersebut menambahkan satu alasan lagi untuk membatalkan pendaftaran, yaitu jika OCI telah melanggar hukum yang berlaku di negara tersebut.

- Ketika RUU tersebut disahkan di Lok Sabha, ini diubah untuk membatasi diskualifikasi terhadap pelanggaran Undang-Undang Kewarganegaraan atau

<p>undang-undang lainnya yang diberitahukan oleh pemerintah pusat. Juga, pemegang kartu harus diberi kesempatan untuk didengar.</p>	
---	--

Sumber: RUU Kewarganegaraan (Amandemen), 2016, disahkan oleh Lok Sabha; RUU Kewarganegaraan (Amandemen), 2019; PRS (PRS Legislative Research).

Dan dalam RUU Amandemen tersebut mengatur bahwa migran ilegal yang memenuhi empat syarat tidak akan diperlakukan sebagai migran ilegal berdasarkan Undang-Undang. Syaratnya adalah:

1. Mereka beragama Hindu, Sikh, Budha, Jain, Parsi atau Kristen
2. Mereka berasal dari Afghanistan, Bangladesh atau Pakistan
3. Mereka memasuki India pada atau sebelum 31 Desember 2014
4. Mereka tidak berada di wilayah suku tertentu di Assam, Meghalaya, Mizoram, atau Tripura yang termasuk dalam Jadwal Keenam Konstitusi, atau wilayah di bawah izin "Garis Dalam", yaitu, Arunachal Pradesh, Mizoram, dan Nagaland.

Dan kembali yang membuat keriuhan di seluruh wilayah India yaitu isi Undang Undang Amandemen yang menyatakan bahwa untuk menetapkan bahwa

umat Hindu, Sikh, Buddha, Jain, Parsi, dan Kristen dari Afghanistan, Bangladesh, dan Pakistan tidak akan diperlakukan sebagai migran ilegal. Tindakan tersebut secara khusus mengecualikan umat Islam. Validitas konstitusional dari undang-undang tersebut telah ditantang di Mahkamah Agung India

3.2 Kapabilitas Ekonomi dan Militer India

Kekuatan ekonomi dan militer merupakan factor kedua dalam menganalisis kebijakan luar negeri yang telah dijelaskan oleh Coplin. Dan pada pembahasan ini, penulis akan menjelaskan bagaimana kekuatan ekonomi dan militer India. Selain itu, penulis juga akan membahas bagaimana pengaruh kekuatan ekonomi dan militer India dapat berpengaruh terhadap kebijakan migrasi India.

India seperti yang kita ketahui merupakan negara yang telah mencapai kemajuan social-ekonomi sejak kemerdekaannya, yaitu 15 Agustus 1947. Dan saat ini India merupakan negara berkembang karena pendapatan per kapita masih rendah, yaitu US \$ 3.460/tahun, persebaran penduduk belum rata, angka kematian bayi yang masih tinggi, dan pencaharian masih bertumpu pada pertanian dan bercocok tanam. Selain itu India juga merupakan negara yang padat penduduk terbesar kedua di dunia dan mayoritas agama penduduknya beragama Hindu.

Namun, India memiliki hubungan baik dengan Inggris sehingga hal ini memberikan keuntungan bagi India karena menjadi negara yang berkembang pesat baik dalam hal ekonomi dan militer. Kini India menjadi salah satu negara yang

mempunyai kekuatan militer terkuat di dunia dan berada di peringkat ke-4 di urutan posisi militer terkuat di dunia. Kekuatan militer India berada di bawah Amerika Serikat, Rusia dan China (Choudhury, 2022).

Factor yang menyebabkan India menjadi salah satu militer terkuat di dunia yaitu:

- a. India menguasai medan perang tertinggi di dunia, gletser Siachen pada 5.000 meter di atas Permukaan Laut Rata-rata (MSL).
- b. Militer India memegang Rekor Dunia untuk menerima Penyerahan Militer Terbesar
- c. India memiliki tentara sukarela terbesar di dunia
- d. Tentara India dianggap sebagai yang Terbaik dalam peperangan di dataran tinggi dan gunung
- e. Tercatat bahwa Adolf Hitler menyatakan keinginannya untuk memperoleh Resimen Gurkha
- f. India secara diam-diam menguji persenjataan nuklirnya pada awal 1970-an dan akhir 1990-an bahkan tanpa CIA mengetahui apa yang terjadi
- g. Aghni dan prithvi merupakan dua rudal balistik berkemampuan nuklir paling akurat di dunia dalam kategori masing-masing
- h. Angkatan Darat India melatih pasukan asing AS, Inggris, Rusia
- i. Tentara India tidak pernah terlibat dalam kudeta militer atau memulai serangan pertama dalam peperangan apa pun
- j. Resimen tertua di Angkatan Darat India adalah Presiden Bodyguard dan didirikan pada tahun 1773

- k. Angkatan Darat India memiliki resimen kuda di Korps Lapis Baja yang disebut Resimen Kuda Poona
- l. Operasi Rahat 2013 adalah salah satu operasi penyelamatan sipil terbesar yang pernah dilakukan dunia
- m. Tentara India membangun jembatan tertinggi di dunia
- n. Kavaleri Cahaya ke-16, resimen Korps Lapis Baja, pasukan tempur utama Angkatan Darat India yang dibentuk pada tahun 1776 dan merupakan resimen lapis baja tertua yang dibuat oleh perusahaan India Timur di Kolkata

Dari penjelasan di atas, kita mengetahui bahwasanya India merupakan salah satu negara terkuat di dunia karena India. Hal ini juga dikarenakan salah satunya ketika Narendra Modi di angkat menjadi Perdana Menteri India. Narendra Modi berhasil mengubah dan membentuk citra pemerintahan India sebagai negara yang kuat dan andal. Banyak hal yang dilakukan Modi untuk mencapai ambisi menjadi kekuatan global. Seperti mempercepat pembangunan infrastruktur umum dan juga mengubah beberapa regulasi yang dianggap menghambat investasi asing. Dari hal ini, India berhasil menjadi negara anggota G7 dan berada di posisi nomer 8. Selain itu juga PDB (Produk Domestik Bruto) India mencapai 42,08 miliar. Dan dari reformasi perekonomian Modi ini, India meningkatkan kekuatan militernya. Dan dalam kebijakan luar negrinya, India berusaha dekat dengan Amerika Serikat. Dan setelah India memiliki kekuatan lebih, maka India membuat dan mengembangkan negaranya menjadi *Soft Power* (Debora, 2017).

Namun, perlu kita ketahui bahwasanya penjelasan posisi India di atas bukan merupakan posisi permanen dalam suatu kelembagaan. Dibalik ambisi Modi bahwa kekuatan ekonomi, militer dan soft power India ini malah mendapat kritik karena kurang lebih 270 juta penduduk India masih banyak yang hidup dalam kemiskinan ekstrem dan banyaknya masyarakat India terutama masyarakat muslim maupun Imigran muslim mendapat perlakuan diskriminasi.

Pada analisis mengenai kekuatan ekonomi dan militer India, dapat kita lihat mengenai kekuatan ekonomi yang berhasil direformasi oleh Modi. Selain itu pada kekuatan militer bahwasanya Modi juga telah melakukan pendekatan dengan Amerika Serikat agar India bisa menjadi negara yang lebih kuat dari sebelumnya. Dari dua perihal ini, Modi berani melakukan amandemen kewarganegaraan yang dinilai sangat diskriminatif terhadap masyarakat muslim.

3.3 Konteks Internasional (Kualitas Pengaruh Hindutva terhadap Kebijakan Migrasi India)

Konteks Internasional merupakan unsur terakhir yang digunakan untuk menganalisis konteks Internasional oleh Coplin dimana sifat sistem negara internasional menentukan bagaimana negara itu berperilaku. Maka pada analisis konteks internasional ini, penulis akan menganalisis dan menjelaskan kondisi internasional yang terjadi di India dimana para imigran terutama imigran muslim

yang terdiskriminasi oleh CAA atau Undang Undang kewarganegaraan 2019 dan juga bagaimana kondisi imigran yang terkena dampak dari kebijakan migrasi yang dipengaruhi oleh kebijakan Hindutva.

Kebijakan Undang Undang Kewarganegaraan India seperti yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya sangat amat membawa pengaruh yang sangat besar bagi masyarakat India dan para imigran muslim yang terintimidasi dan terdiskriminasi oleh peraturan yang dibuat oleh pemerintah India. Kebijakan tersebut juga telah membuat keributan yang serius dan menimbulkan banyak korban hingga banyak merenggut nyawa masyarakat India ataupun imigran yang berusaha menentang Undang Undang Amandemen Kewarganegaraan India atau CAB (*Citizen Amandemen Bill*).

Hal ini dapat kita telaah lagi bahwasanya CAB atau RUU Amandemen ini dikatakan sebagai sebuah upaya untuk memberikan kewarganegaraan bagi para imigran dan merupakan perbaikan dari Undang Undang 1955. Namun pada dasarnya Undang Undang Amandemen tersebut sangat menentang konstitusi dimana agama dan budaya ikut terlibat yang mengakibatkan kerusuhan dan merasa tertindasnya masyarakat muslim India dan imigran India. Undang Undang Amandemen ini membedakan kewarganegaraan berdasarkan keyakinan dan juga etnis dimana masyarakat minoritas di India terutama muslim banyak yang kehilangan kewarganegaraan dan ketika ada pembaruan NRC pada tahun 2014. Namun menteri dalam negeri Amit Shah menolak pemberitaan tersebut dan menyatakan penjelasannya dalam beberapa hal:

1. Tuduhan CAB (*Citizen Amandemen Bill*) adalah tidak benar
2. Berusaha memberikan keadilan untuk minoritas di tiga negara muslim yaitu Afghanistan, Pakistan dan Bangladesh
3. RUU Amandemen ini tidak akan muncul apabila pemisahan tidak dilakukan atas dasar agama

Namun, oposisi berpendapat bahwa CAB diserang oleh partai oposisi dan minoritas muslim di India atas dasar bertentangnya RUU Amandemen 2019 dengan konstitusi, artinya CAB ini sangat membedakan kewarganegaraan masyarakat di India berdasarkan keyakinan, etnis hingga budaya (The Times of India, 2020).

Status kewarganegaraan masyarakat India beserta para imigrannya kini bergantung dengan Undang Undang yang kebijakannya juga memiliki hubungan dengan Hindutva. Hindutva menurut Tom Vaddakan yang merupakan seorang anggota BPJ mengatakan bahwasanya Hindutva tidak memecah belah India dan justru merupakan sebuah realitas sejarah dan peradaban. Selain itu juga tidak ada bentuk pemaksaan dalam pengangkatan Hindutva sebagai ideologi negara (Krishnan, 2022). Namun pada dasarnya ideologi Hindutva ini telah memecah belah India dan balik lagi kepada tujuan awal Hindutva yaitu ingin menjadikan India seluruhnya beragama Hindu.

Jika kita lihat pada tahun 2003 bahwa Undang Undang kewarganegaraan di amandemen yang akhirnya mengeluarkan gagasan “Imigran Legal” kedalam Undang Undang. Lalu hal ini membuat para imigran banyak yang tidak memenuhi syarat untuk mengajukan kewarganegaraan melalui pendaftaran naturalisasi atau NRC.

Imigran ilegal ini didefinisikan bagi mereka yang tidak memiliki dokumen perjalanan yang lengkap atau telah melewati masa berlaku visa mereka. Penyusunan daftar warga negara nasional Undang Undang Amandemen 2003 ini mendapat dukungan dari kongres dan partai kiri (Australian Institute of International Affairs, 2020).

Untuk lebih jelas mengenai status imigran dapat kita lihat pada gambar berikut:



Gambar 1: Status CAA, NRC dan NPR

Ministry of Home Affairs

Status of CAA, NRC and NPR

Posted On: 10 AUG 2021 6:10PM by PIB Delhi

The Citizenship (Amendment) Act, 2019 aims to facilitate grant of citizenship to migrants belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi or Christian community from Pakistan, Bangladesh and Afghanistan who entered into India on or before the 31.12.2014 and who have been exempted by the Central Government by or under clause (c) of sub-section (2) of section 3 of the Passport (Entry into India) Act, 1920 or from the application of the provisions of the Foreigners Act, 1946 or any rule or order made thereunder. The Citizenship (Amendment) Act, 2019 has been notified on 12.12.2019 and has come into force w.e.f. 10.01.2020.

Till Now, the Government has not taken any decision to prepare National Register of Indian Citizens (NRIC) at National Level.

Further, Government decided to update the National Population Register (NPR) under the Citizenship Act, 1955 along with the first phase of Census, 2021. The demographic and other particulars of each family and individual were to be updated/collected during the exercise of updation of NPR. No document is to be collected during this exercise. However, due to outbreak of Covid-19, the updation of NPR and other related field activities have been postponed.

This was stated by the Minister of State for Home Affairs, Shri Nityanand Rai in a written reply to question in the Lok Sabha today.

NW/RK/PK/DDD/3455

(Release ID: 1744502)

(Sumber: <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1744502>)

Gambar di atas merupakan status CAA, NRC, dan NPR yang mana dijelaskan bahwasanya:

1. Undang-Undang Kewarganegaraan (Amandemen), 2019 bertujuan untuk memfasilitasi pemberian kewarganegaraan kepada migran yang tergabung dalam komunitas Hindu, Sikh, Buddha, Jain, Parsi atau Kristen dari Pakistan, Bangladesh, dan Afghanistan yang masuk ke India pada atau sebelum 31-12-2014 dan yang telah telah dikecualikan oleh Pemerintah Pusat oleh atau berdasarkan klausa (c) sub-bagian (2) pasal 3 Undang-Undang Paspor (Masuk ke India), 1920 atau dari penerapan ketentuan Undang-Undang Orang Asing, 1946 atau aturan apa pun atau pesanan yang dibuat di bawahnya. Undang-Undang Kewarganegaraan (Amandemen), 2019 telah diberitahukan pada 12.12.2019 dan mulai berlaku sejak 10.01.2020.
2. Pemerintah belum mengambil keputusan untuk Menyusun *National Register of Indian Citizens* (NRIC) di tingkat nasional
3. Pemerintah memutuskan untuk memperbarui Daftar Penduduk Nasional atau NPR (*National Population Register*) di bawah Undang Undang Kewarganegaraan 1955 bersama dengan sensus tahap pertama 2021.
4. Karena merebaknya Covid-19, pembaruan NPR dan kegiatan lapangan terkait lainnya ditunda.

Dari sini dapat kita lihat berarti bahwa status kewarganegaraan para imigran mengalami ketidakjelasan dan banyak imigran di India yang masih belum memiliki status kewarganegaraan terutama imigran muslim. Dan kabarnya pemerintah India

hingga saat ini belum merencanakan lagi mengenai keputusan dalam menyiapkan keputusan daftar nasional warga negara India atau NRC (Ani, 2020).



BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Untuk menjadikan sebuah negara yang tertata dan memiliki keamanan negara yang kuat maka negara itu harus memiliki kebijakan yang tercantum dalam Undang-Undang dimana peraturan dan kebijakan dibuat untuk di taati oleh seluruh masyarakat di dalamnya. Di India, kebijakan sebuah negara dibuat berdasarkan budaya dan agama karena seperti yang kita ketahui bahwasanya India sangat kental dengan budaya dan agama terutama Hindu yang mempunyai kasta dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari ini kehidupan social masyarakat India sangat bergantung pada agama. Bahkan komunitas-komunitas tertentu pun memiliki hubungan erat dengan agama seperti Hindutva yang telah berdiri sejak lama di India yang kini keberadaannya dinilai sangat kejam karena pergerakannya yang kejam terhadap masyarakat muslim dan imigran terutama imigran muslim di India.

Dan pada penelitian ini, peneliti memakai teori decision making oleh William D. Coplin. Yang mana pada penelitian ini, penulis berusaha menjawab rumusan masalah dengan menganalisis kebijakan migrasi India melalui tiga faktor, yaitu pertama melalui konteks politik domestic, kedua melalui konteks ekonomi dan kekuatan militer, dan yang ketiga yaitu melalui konteks internasional.

Hindutva kini sebagai ideologi negara India memiliki tujuan utama yaitu ingin menjadikan negara India menjadi negara yang seluruh masyarakatnya beragama Hindu. Bahkan kabarnya masyarakat non Hindu di India mendapat paksaan untuk mengikuti budaya dan kegiatan Hindu terhadap kehidupan sehari-hari. Tidak hanya itu, toleran Hindu pun akan ikut terdiskriminasi jika terus melakukan toleransi agama terhadap muslim terutama. Hindutva sebagai ideologi politik India dan ideologi nasionalisme keagamaan India ini sangat berpengaruh terhadap kebijakan sebuah negara. Hindutva ini mendapat dukungan dari RSS yang merupakan sebuah organisasi masyarakat yang paling berpengaruh di India yang juga bertujuan ingin membentuk negara Hindu di India. Setelah itu Narendra Modi yang dulunya merupakan anggota RSS akhirnya mendapat dorongan untuk ikut terjun kedalam sebuah partai politik di India yaitu BJP pada tahun 2014. Pada saat itu Narendra Modi mulai berkuasa dan banyak merekrut orang-orang penting di posisi strategis agar tujuannya mudah tercapai dan terkendali.

Adapun kejadian anti muslim di Gujarat dan terjadi kerusuhan yang sangat hebat pada saat itu di pelopori oleh Narendra Modi. Dan sejak saat itu rasa kemanusiaan Narendra Modi terhadap keamanan masyarakat dan negara dipertanyakan. Namun, Narendra Modi tetap menjabat dan memiliki kekuatan untuk lebih berkuasa dan mengatur segalanya di India salah satunya yaitu untuk memodernisasikan India.

Dalam analisis penelitian ini, penulis memberikan penjelasan mengenai kebijakan Undang-Undang Kewarganegaraan pada tahun 2016 yang diperkenalkan

dan akhirnya Undang Undang Amandemen tersebut di sah kan di Lok Sabha pada tahun 2019. Dan mulai saat itu kericuhan terjadi dimana mana di India yang mengakibatkan banyak banyak korban karena banyak demonstiran yang menentang CAB yang baru saja di sah kan tersebut. Hal ini dikarenakan isi dari Undang Undang Amandemen yang dinilai mendiskriminasi masyarakat muslim dan terutama imigran muslim di India.

Lalu adapun data mengenai perbedaan kebijakan Undang Undang Kewarganegaraan pada tahun 2016 dan 2019 pada bab III. Sebuah isi dari Undang Undang Amandemen Kewarganegaraan yang menuai banyak protes karna dinilai tidak adil dan diskriminatis terhadap masyarakat dan agama terutama umat muslim. Dan selanjutnya mengenai nasib imigran yang tidak mendapatkan kewarganegaraan akibat pembaruan NRC atau daftar nasional warga negara India juga dapat dilihat pada Gambar. 1 yang berisi penjelasan tertunda nya penyusunan Daftar Penduduk Nasional bahwasanya tidak ada kejelasan hingga saat ini di tahun 2022 Pemerintah India untuk melakukan penyusunan ulang daftar nasional warna negara India.

4.2 Rekomendasi/Saran

Merujuk pada hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentunya penelitian ini masih banyak sekali kekurangan hingga keterbatasan dalam penulisan terutama pada sumber bacaan yang tidak semuanya dapat terbuka oleh pihak pihak terkait. Saran dan rekomendasi pada penelitian ini tentunya sangat diharapkan nantinya untuk membantu memperbaiki penelitian selanjutnya dengan tema yang serupa. Penelitian

ini hanya berfokus terhadap kebijakan di India oleh Hindutva terhadap imigran di India terutama imigran muslim yang menjadi banyak korban diskriminasi yang hingga merenggut banyak nyawa. Dan tentunya hal ini menjadi perhatian public internasional atas keamanan manusia yang berusaha untuk mendapatkan keadilan bernegara dan bermasyarakat tentunya. Pada penelitian ini selanjutnya diharapkan bisa lebih baik dalam meneliti tema yang serupa dengan rentang waktu penelitian terkini.



DAFTAR PUSTAKA

- Saputra, E. Y. (2019, Desember Selasa). *Dengan UU Kewarganegaraan, Sekularisme India Menjadi Negara Hindu*. Retrieved from Tempo.co: <https://fokus.tempo.co/read/1284646/dengan-uu-kewarganegaraan-sekularisme-india-menjadi-negara-hindu>
- BBC News. (2019, Desember 11). Citizenship Amendment Bill: India's new 'anti-Muslim' law explained.
- Iqbal, D. K. (2019). The Rise of Hindutva, Saffron Terrorism and South Asian Regional Security . *Jurnal Keamanan dan Analisis Strategis*, Vol. V, No. 1.
- Savarkar, S. V. (1928). *Essentials of Hindutva*. Nagpur: Dhananjay Keer.
- Ulum, R. (2018). Institusi Minoritas dan Struktur Sosial di India. *Harmoni*.
- Nurmilad, A. C. (2017). *Peningkatan Kerjasama India-Bangladesh Dalam Penanganan Imigran Ilegal Bangladesh di India 2009-2011*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Carolyn M. Warner, a. S. (2011). Thinking about the Role of Religion in Foreign Policy: A Framework for Analysis. 113-135.
- BBC News. (2020, January). Citizenship Amendment Act: Court refuses to put controversial law on hold.
- The Indian Express. (2021, June Monday,7). Explained: What NRC+CAA means to you.
- Robby, H. M. (2021). Exercising the Politics of Salvation: Analyzing Foreign Policy Responses of India and Turkey during Humanitarian Crises (2014-2019).

- Chiriyankandath, D. J. (2007, September). Religious nationalism and foreign policy: India and Israel compared.
- Alamari, M. F. (2020). Imigran dan Masalah Integrasi Sosial. *Jurnal Dinamika Global Vol. 5 No. 2*.
- Katzenstein, P. J. (1996). *The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics*. New York: COLUMBIA UNIVERSITY PRESS .
- BBC News. (2019, Juni). Retrieved from <https://www.bbc.com/news/world-asia-india-48704352>
- Nasution, M. (2021, Mei). Dukung Zionisme yang Usir Umat Islam, Inilah Hindutva, Para Ekstrimis Hindu yang Ingin Buat India untuk Hindu Saja. Retrieved from <https://intisari.grid.id/read/032708191/dukung-zionisme-yang-usir-umat-islam-inilah-hindutva-para-ekstrimis-hindu-yang-ingin-buat-india-untuk-hindu-saja?page=all>
- sheni, Y. (2003). Hindutva as an Ideology of cultural nationalism. *Sage*.
- Samuel, R. (2020, Maret 2). Nasionalisme Gandhi Dikoyak Nasionalisme Hindu Di India.
- Brekke, T. (2019). The History of Hindu Nationalism in India. In *Modern Hinduism* (p. 203). New Delhi: Oxford University Press.
- Samrin. (2018). Modernisasi Islam di India. 81.
- Savarkar, S. V. (1883-1966). Essentials of Hindutva. 6.
- Sharma, A. (2020). *On the Difference Between Hinduism and Hindutva*. South Asia: Spring 2020.

- Kulkarni, P. (2018, October 7). *History Shows How Patriotic the RSS Really Is*. Retrieved from The Wire: <https://thewire.in/history/rss-hindutva-nationalism>
- Ramachandran, S. (2020). *Hindutva Violence in India: Trends and Implications*. *International Centre for Political Violence and Terrorism Research*, 1-6.
- The Hindu Net Desk. (2019, December 11). *Parliament proceedings live updates December 11, 2019 | Rajya Sabha passes Citizenship (Amendment) Bill; Ayes 125, Noes 105*. Retrieved from The Hindu: <https://www.thehindu.com/news/national/parliament-proceedings-live-winter-session-december-11-2019/article30274548.ece>
- Republika.co.id. (2019, September 03, Selasa). Retrieved from <https://www.republika.co.id/berita/px8jog366/dua-juta-orang-di-assam-india-tak-diakui-kewarganegaraannya>
- Krishnan, M. (2022, 02 21). Retrieved from dw.com: <https://www.dw.com/id/pemerintah-india-mau-nilai-nilai-hindu-jadi-ideologi-negara/a-60856452>
- Alamari, M. F. (2020). *Imigran dan Masalah Integrasi Sosial*. *Dinamika Global*, 254-261.
- Australian Institute of International Affairs. (2020, January 30). Retrieved from <https://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/indias-citizenship-amendment-act-2019/>
- Ani. (2020, Maret 15). *No decision to prepare NRC at national level: Govt in Lok Sabha*. Read more at: https://economictimes.indiatimes.com/news/india/no-decision-to-prepare-nrc-at-national-level-govt-in-lok-sabha/articleshow/90224703.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=.

Retrieved from The Economic Times:
<https://economictimes.indiatimes.com/news/india/no-decision-to-prepare-nrc-at-national-level-govt-in-lok-sabha/articleshow/90224703.cms>

The Times of India. (2020, April 13). Retrieved from TIMESOFINDIA.COM:

<https://timesofindia.indiatimes.com/india/what-is-citizenship-amendment-bill-all-you-need-to-know/articleshow/72359111.cms>

Saputra, A. M. (n.d.). Dilema dalam Kebijakan Negara dan Keamanan Manusia: Kasus Kebijakan India pada Pemerintahan Narendra Modi, Perdana Menteri India. *Foreign Policy*, 15-17.

Rusmianti, N. M. (2021). ANALISIS KONFLIK TERHADAP PENERAPAN KEBIJAKAN THE CITIZENSHIP AMENDMENT BILL DI INDIATAHUN 2019. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 291-301.

Hipotesa. (2021, April 11). Retrieved from
<https://www.youtube.com/watch?v=UXveiyf3Q80>

PRS Legislative Research. (n.d.). Retrieved from <https://prsindia.org/billtrack/the-citizenship-amendment-bill-2019>

Iqbal, K. (2019). *The Rise of Hindutva, Saffron Terrorism and South Asian Regional Security*. Strategic Vision Institute.

Katzenstein, P. J. (2002). Alternative Perspectives on National Security. In *The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics* (pp. 9-13).
<http://www.ciaonet.org/book/katzenstein/katz01.html>.

Coplin, W. D. (1971). Introduction to International Politics; a Theoretical Overview.
Markham Publishing Company.

Nasrullah, N. (2020, November 04). Islam Pernah Berkuasa di India, Mengapa Tetap Hindu?

Dickson. (2022, July 28). Profil Negara India (Republik India).

Choudhury, S. (2022, February 04). Retrieved from Times of India:
<https://timesofindia.indiatimes.com/india/in-charts-how-india-has-the-worlds-4th-best-military/articleshow/89320053.cms>

Debora, Y. (2017, November 07). Yang Sudah Dilakukan India Supaya Jadi kekuatan Global.

(n.d.).

